

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.1-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Awaloedin Djamin, 2006, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*, PTIK Press, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta.

Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif*, Genta Publishing, Yogyakarta.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta.

Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubak Agung, Bandung.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*. Mandar Maju Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,

Praja, Juhaya S. 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung.

PAF. Lamintang, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditiya Bakti, Bandung

R. Susilo, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor.

Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru Cet. 4

SR. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia Jakarta.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa.

Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada Jakarta.

Soegiri, dkk., 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra Djaja, Jakarta

Toetik Rahayuningsih, 2002, *Peradilan Militer Di Indonesia Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelakunya*, LPPM Universitas Airlangga Surabaya.

Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Pres, Malang,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang  
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional  
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit  
Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal /29/IX/2007,  
tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana  
Desersi di Lingkungan TNI Angkatan Laut, Markas Besar TNI  
Angkatan Laut, Jakarta.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal /79/XII/2011,  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tim Peneliti Tabiat Bintara atau  
Tamtama TNI Angkatan Laut, Markas Besar TNI Angkatan Laut,  
Jakarta.

Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep /1434/X/2012, tentang  
Buku Petunjuk Teknis Penerapan Sanksi Administratif Bagi  
Prajurit TNI Angkatan Laut, Markas Besar TNI Angkatan Laut,  
Jakarta.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang  
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000  
tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian  
Negara Republik Indonesia.

C. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa  
Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Balai  
Pustaka. Jakarta.

D. Jurnal/Makalah

Ahmad Azahari, 2012, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut*, Studi Kasus Desersi Di Pomal Lantamal I Belawan, Tesis, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Agita Kartika Ayuningtyas, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya NOMOR: PUT/29-K/PM.III-12/AD/II/2009*, Tesis, (Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Surabaya).

Burhan Dahlan, 2010, *Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absentia Di Persidangan*, Makalah disampaikan pada Seminar Penegakan Hukum TNI di Jakarta.

Hidayat Manao, 2010, Makalah, *Pemecatan Prajurit TNI*, Medan

I Gede Artha, 2012, *Disertasi : Reformulasi Pengaturan Putusan Bebas Dan Upaya Hukumnya Bagi Penuntut Umum Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Imron Anwari, 2012, *Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer Dan Akibatnya*, Makalah disampaikan pada Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia di Manado

